



Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PENANGANAN COVID-19—Seorang pewarta melintas di depan tumpukan kardus masker di Kantor BPBD Sumbar pada awal September 2020 lalu. Penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Sumbar disorot setelah BPK menyampaikan temuan potensi penyimpangan ke DPRD Sumbar. JULI ISHAQ

Penggunaan Dana Covid-19 Bermasalah



DALAM situasi darurat nasional saat itu, bahkan kami sampai *browsing* untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Seperti masker saat itu satu kotak Rp300 ribu. Ini yang kemudian jadi temuan kemahalan oleh BPK sekitar Rp4,9 miliar. Alhamdulillah sudah dikembalikan pihak penyedia.

ERMAN RAHMAN
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar

PADANG, HALUAN—DPRD Sumbar menugaskan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti LHP BPK terkait potensi penyalahgunaan anggaran Covid-19 di Sumbar. Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman menyebutkan, memang ditemukan pengadaan barang yang kemahalan senilai Rp4,9 miliar, tetapi telah dikembalikan oleh pihak penyedia.

Hal itu disampaikan Erman kepada Haluan, Selasa (23/2) malam. Menurutny, pengadaan sejumlah barang dalam rangka penanganan

>> PENGGUNAAN hal 07

Penggunaan Dari Halaman. 1

Covid-19 di Sumbar pada awal pandemi memang berlangsung dalam situasi *extraordinary* atau luar biasa. Sehingga wajar terjadi pemahalan harga untuk beberapa item barang sulit diperoleh di pasaran.

"Situasinya saat itu awal pandemi, dan *extraordinary*. Pengadaannya pakai pola pengadaan khusus. *Pre order* (PO) darurat, tetapi bisa dipertanggungjawabkan, yang penting ada ketersediaan logistik bagi tenaga medis dan masyarakat seperti, baju hazmat, masker, dan *hand sanitizer*. Dalam situasi saat itu, tentu keselamatan warga diutamakan," kata Erman.

Erman menggambarkan, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat pihaknya yang bertugas melakukan pengadaan barang, melakukan berbagai upaya agar kebutuhan alat penanganan Covid-19 dapat tersedia. Saat itu, katanya, anggaran tersedia, tetapi barang yang dibutuhkan sulit ditemukan.

"Bahkan kami sampai mengandalkan *browsing* di internet untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Seperti masker saja saat itu satu kotak melonjak jadi Rp300 ribu. Nah, hal seperti ini yang kemudian jadi temuan kemahalan oleh BPK. Nilainya sekitar Rp4,9 miliar," katanya lagi.

Namun begitu, kata Erman lagi, berdasarkan pakta integritas yang terjamin antara pihak penyedia dengan BPBD Sumbar, maka temuan kemahalan harga tersebut bersedia dikembalikan oleh pihak penyedia. "Alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh penyedia. Mereka paham dengan kondisi bahwa terjadi kemahalan harga, dan bersedia mengembalikan Rp4,9 miliar," katanya lagi.

Terkait jumlah potensi penyalahgunaan anggaran dalam LHP BPK kepada DPRD Sumbar yang disebut sekitar Rp150 miliar, Erman menyebutkan bahwa angka tersebut adalah total dana penanggulangan Covid-19 di Sumbar, yang digunakan untuk penyediaan barang-barang kebutuhan oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi.

"Tapi total anggaran yang kita dapatkan untuk penanganan Covid-19, yang digunakan untuk membeli logistik. Terkait berapa kebutuhan seperti alat pelindung diri (APD), kita menyediakannya berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan. Sebab, BPBD adalah pelaksana dalam pengadaan," kata Erman lagi.

Pada prinsipnya, Erman menekankan bahwa pihaknya telah bekerja secara ekstra dalam menyikapi kondisi luar biasa atau *extraordinary* pada awal-awal pandemi terjadi. Terlebih, menurutnya Presiden RI juga mengarahkan agar pemerintah terkait segera melakukan belanja dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

"Pada intinya, pengadaan di tengah situasi

darurat saat itu adalah yang pertama kali kami alami di BPBD. Kalau memang ada yang keliru dan butuh diperbaiki ke depannya, tentu akan kita perbaiki. Sementara itu soal teguran, sudah kita tindak lanjuti dengan beberapa penyedia barang," ucapnya menutup.

Pansus Konsultasi ke BNPB

Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Keparutuhan Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar telah melakukan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Senin (22/2) terkait temuan BPK tersebut. Namun, dalam kesempatan itu terjadi polemik karena sejumlah pejabat Pemprov Sumbar juga turut serta.

Wakil Ketua Pansus Keparutuhan Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar Nofrizon kepada Haluan mengatakan, sesuai permintaan pimpinan DPRD, Pansus Keparutuhan Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar melakukan konsultasi ke BPNB, untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK serta mempertanyakan teknis pelaksanaan penanganan Covid-19.

"Tapi dalam pertemuan itu, juga hadir pejabat Pemprov yang tidak diundang. Mereka tidak diminta datang, tapi ramai-ramai ke sana. Apa urusannya? Sehingga kami menyuruh mereka keluar," kata Nofrizon, Selasa (23/2).

Menurut Nofrizon, jumlah Pejabat Eselon II Pemprov yang turut hadir saat itu mencapai puluhan orang. "Ramai, lebih kurang 10 orang pejabat. Apa korelasinya mereka ikut. Apa maksud dan tujuannya? Kalau mau konsultasi, silakan, tidak ada yang melarang, tapi bikinlah surat sendiri," ucapnya lagi.

Politisi Demokrat itu menambahkan, tujuan konsultasi yang dilakukan Pansus Keparutuhan Penanganan Covid-19 DPRD Sumbar ke BNPB adalah menindaklanjuti LHP BPK kepada DPRD Sumbar, terkait dugaan temuan sekitar Rp150 miliar dalam pengadaan barang yang diduga tak sesuai ketentuan.

Pembentukan Pansus sendiri berlangsung dalam rapat paripurna pada Rabu (17/2) sore. Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi menjelaskan, DPRD menerima LHP BPK terkait keparutuhan penanganan Covid-19 tersebut pada 29 Desember 2020.

"Dalam LHP Keparutuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya ada indikasi memahalkan harga pengadaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan transaksi pembelian kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan," kata Supardi saat itu. (h/len/mg-fdi)